

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Ahmad Ulil., Lazuardi, Sakti., dan Putri, Ditta Chandra. 2020. Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*. Volume 14 (1).
- Anantadjaya, S. P., Tj, H., Yulia, Y., Sebayang, A., & Sagara, Y. 2020. The Political Reality And Democracy Of Regional Business In Covid-19 Situation. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 2020.
- Anugrah, Nunu. 2021. Jelang Kongres Kehutanan Indonesia Ke-7, DKN Jaring Pendapat Setiap Regional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4541
- Awang, S.A., Widayanti, W.T., Himmah, B., et al. 2008. *Panduan pemberdayaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)*. Pusat Kajian Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada.
- Denhardt J. V. and R. B. Denhardt. 2003. *The New Public Service; Serving, not Steering*. M.E. Sharpe, New York. Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press. Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. UGM Press. Yogyakarta

- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM. Yogyakarta
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*. Lokakarya Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Jakarta
- Eggers, William D., O'Leary, John. 1995. *Revolution at the roots: Making our government smaller, better, and closer to home*. Simon and Schuster, US.
- FAO. 2011. *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. 2020. Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 6(2), 297-312.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta.
- IFAD. 1999. *Good Governance: An Overview*. International Fund for Agricultural Development, Roma
- Karnantohadi, Pung. 2020. *Prinsip hukum pelayanan perizinan terpadu di Indonesia*. Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). 2022. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. KNKG: Jakarta.

- KPK. 2013. *Kajian Perijinan di Sektor Sumberdaya Alam: Studi Kasus Sektor Kehutanan*. Jakarta
- Lincoln, Yvonna S., dan Guba Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications. California
- Listiyani, Nurul., Akbar Hayat, Muzahid., dan Mandala, Subianta. 2018. Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217-227.
- Martono, Edhi., Masyhuri. 2021. *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro*. UGM Press. Yogyakarta
- Maryudi, A., Suprpto, E., Iswari, P. 2014. *Laporan Studi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Memperbaiki Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan Indonesia (Kasus: Hutan Hak dan Industri Kecil di Klaten, Jawa Tengah)*. Dewan Kehutanan Nasional atas Kerjasama dengan Kemitraan dalam Program FLEGT-VPA. Klaten
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Juanda. 2012. Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol, 1(3), 19-29.
- Nugroho, Riant. 2012. *Publik Policy*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Perubahan Budaya Birokrasi Untuk Mewujudkan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Pemerintahan Modern.
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 11(3), 403-422.

Nursalam. 2016. *Metodologi Penelitian*. Selemba Medika, Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL/SET/KUM.1/5/2020 Tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Prabowo, Adhi Setyo., Triputra, A. N., Junaidi, Y., Purwoleksono, D. E. 2020. Politik hukum omnibus law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13 (1), 1–6.

Rahmi, Wahyuni. 2015. *Analisis Vegetasi Tumbuhan Asing Invasif di Cagar Alam Lembah Harau*. Doctoral dissertation, Universitas Andalas.

Renjaan, Henrikus., Erare, Simin Ronald. 2013. Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Patriot*. Volume 6 (1) 54-101.

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Sekretariat Negara. Jakarta
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. 2022. Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75.
- Satori , Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . CV Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti. 2004. *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Sidik, Sadar Maulana., Manuhutu, Jorgy BJ., Ramadhani, Fadhilla., et al. 2023. Media Sosial dalam Percepatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 2(2), 25-30.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Siswoko, B. 2009. Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan Volume III No.1 - Januari 2009*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Smith, S. R., Ingram, H., 2011. *Public policy for democracy*. Brookings Institution Press. Massachusetts, Washington DC
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.

Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Cv Alfabeta. Bandung

Taneo, Kevy Listiana Fransiska., Yohanes G. Tubahelan., Kotan Y. Stefanus. 2019. Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima. *Jurnal Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 34(3), Hal. 309-316.

Utomo, Pudjo. 2020. Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2(1), 33-41..